

○○○

**Kasus keracunan
MBG pada
Rabu (17/9/2025)**

- **GARUT, JAWA BARAT:**
194 siswa keracunan setelah menyantap menu MBG (nasi putih, ayam woku, tempe orek, lalapan sayur, stroberi). Sebanyak 177 siswa mengalami gejala ringan, sementara 19 dirawat intensif di Puskesmas Kadungora.
- **SUMBAWA, NTB:**
90 siswa MTsN 2 mengalami mual, muntah, dan diare usai menyantap menu MBG. Beberapa siswa bahkan tidak masuk sekolah.
- **LAMONGAN, JAWA TIMUR:**
13 siswa SMAN 2 dilarikan ke RS karena keracunan. Empat siswa diperbolehkan pulang, sisanya masih dirawat.

**LAGI, RATUSAN SISWA KERACUNAN
SETELAH SANTAP MBG**

Ratusan siswa kembali mengalami keracunan diduga setelah melahap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus keracunan ini terjadi di beberapa daerah, di antaranya di Garut, Jawa Barat, sebanyak 194 siswa, di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) 90 siswa, di Lamongan ada 13 siswa pada Rabu (17/9/2025). Sebelumnya, kasus keracunan MBG terjadi di beberapa tempat dengan jumlah korban juga ratusan anak. Meski sudah kerap kali terjadi keracunan, namun kejadian serupa masih terulang. Lantas apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama terulangnya kasus keracunan makanan yang dananya bersumber dari APBN ini. Bahkan, anggaran yang sudah mengalir ke MBG ini cukup besar. Tercatat, per tanggal 15 September 2025, dengan 8.018 dapur MBG/Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi, telah menyerap anggaran sekitar Rp 15,7 triliun. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya supaya keracunan MBG tak lagi dan terulang lagi. Di antara adalah menggandeng BPOM guna mamastikan keamanan menu dan bahan makanan yang akan dibagikan ke para siswa tersebut. Kemudian juga terus berupa mencari penyebab keracunan guna menemukan solusinya. Di satu sisi, berbagai kalangan pun melontarkan pertanyaan, kritik, dan saran supaya kasus tersebut tidak terulang lagi dan lagi.

BACA HAL 11...



Ratusan Siswa di Sumbawa alami keracunan usai santap MBG. (ist)

MENKEU DAN BANGGAR SEPAKAT RAPBN 2026 RP3.842 T

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Banggar Purbaya dan Banggar sepakat RAPBN 2026 dengan rincian belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun untuk dibawa ke paripurna.

Pengambilan keputusan ini diambil saat rapat kerja di Banggar DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9/2026). Mulanya, empat panitia kerja RAPBN 2026 membacakan laporan kerjanya. Setelah itu, laporan keempat panja disetujui oleh Banggar DPR dan Pemerintah. "Apakah (laporan empat panja) dapat disetujui?" kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah. "Setuju," jawab forum

Pemerintah dalam hal ini Menkeu, kemudian ada juga Gubernur BI serta Bappenas juga sepakat dengan besaran anggaran dalam RAPBN 2026 tersebut.

"Saya ingin minta persetujuan bapak ibu sekalian, apakah hasil rapat kita hari ini dapat kita sepakati dan akan kita bawa di dalam paripurna pada tanggal 23 yang akan datang?" tanya Said meminta persetujuan yang kemudian dijawab setuju oleh forum.

"Kawan-kawan semua, barusan kami selesai rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I untuk RAPBN tahun 2026. Memang disadari dalam rapat tersebut ada berbagai penyesuaian. Karena adanya penyesuaian itu tentu terjadi peningkatan belanja, baik di pusat maupun di daerah. Semua ini dilakukan pemerintah bersama Badan Anggaran DPR dalam rangka merespons berbagai kebutuhan, khususnya untuk TKD, daerah istimewa, dan dana otonomi khusus," ujar Said.

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa Banggar dan pemerintah menyepakati proyeksi penerimaan negara tahun 2026 naik dari Rp3.147 triliun menjadi Rp3.153 triliun. Kenaikan ditopang oleh penerimaan cukai dan PNBPN.

"Kenaikan ini terjadi bukan hanya dari cukai, yang awalnya Rp302 triliun menjadi Rp336 triliun, tetapi juga dari PNBPN, yang awalnya Rp455 triliun menjadi Rp459,199 triliun," jelas Said.

Meski demikian, Said menegaskan penambahan belanja pusat maupun

transfer ke daerah menyebabkan defisit RAPBN 2026 melebar. "Defisit yang awalnya diperkirakan 2,48 persen disepakati bersama pemerintah dan Banggar DPR menjadi 2,68 persen. Artinya, defisit naik dari Rp638,807 triliun menjadi Rp689,147 triliun. Dari PDB, sebagaimana saya sampaikan tadi, dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen" paparnya.

Untuk menjaga transparansi, Said memaparkan sejumlah pos belanja yang mengalami penyesuaian. Transfer ke daerah naik Rp43 triliun, Dengan rincian: Dana Alokasi Umum bertambah Rp26,2 triliun; Dana Otonomi Khusus bertambah Rp851 miliar; Dana Keistimewaan Yogyakarta naik dari Rp500 miliar menjadi Rp1 triliun; Dana Alokasi Khusus non-fisik (TPG/Tunjangan Profesi Guru) bertambah Rp2 triliun; Dana Bagi Hasil bertambah Rp13,44 triliun; Belanja pusat juga mendapat tambahan Rp7,3 triliun, antara lain; Kementerian ESDM: Rp2 triliun; Kementerian Kominfo: Rp537,78 miliar; UMKM: Rp250 miliar; BP Batam: Rp80 miliar; Kejaksaan Agung: Rp250 miliar; Kementerian Perhubungan: Rp769 miliar; Kementerian Luar Negeri: Rp196 miliar; Kementerian Pendidikan dan Riset (20% tambahan untuk pendidikan): Rp873,8 miliar; Kementerian PANRB: Rp1,282 triliun; Kementerian Tenaga Kerja: Rp144 miliar; dan Cadangan belanja: Rp141 miliar.

Said menambahkan, dari tambahan DAU sebesar Rp6,9 triliun, sebagian besar juga dialokasikan untuk sektor pendidikan.

"Itulah yang bisa kami sampaikan kepada kawan-kawan semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Transparansi sudah kami mulai ciptakan, dan kami sampaikan tidak lebih dan tidak kurang, itulah postur APBN kita di tahun 2026," pungkas Said.

Dalam RAPBN 2026 juga ada pelebaran defisit dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen terhadap produk



Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Istimewa)

domestik bruto (PDB). Nilainya setara Rp689 triliun, naik dari sebelumnya Rp638,8 triliun.

"Defisit awalnya Rp638,8 triliun menjadi Rp689 triliun. Persentase defisit terhadap PDB dari 2,48 persen kini menyesuaikan menjadi 2,68 persen, atau ada kenaikan sebesar 0,2 persen," ujar Ketua Banggar, Said Abdullah, dalam rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo di Kompleks Parlemen, Kamis (18/9/2025).

Pelebaran defisit dipicu tambahan belanja negara yang meningkat Rp56,2 triliun, dari Rp3.786,5 triliun menjadi Rp3.842,7 triliun. Kenaikan terbesar berasal dari transfer ke daerah (TKD) yang melonjak Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun.

"Kenaikan TKD sebesar Rp43 triliun ini sesuai dengan permintaan komisi-komisi dan aspirasi daerah, sehingga totalnya menjadi Rp693 triliun," jelas Said.

Selain TKD, belanja kementerian/ lembaga juga naik Rp12,3 triliun menjadi Rp1.510,5 triliun, sedangkan belanja non-K/L bertambah Rp900 miliar menjadi Rp1.639,2 triliun. Di sisi lain, pendapatan negara ditargetkan bertambah Rp5,9 triliun menjadi Rp3.153,6 triliun. Penerimaan pajak naik tipis Rp1,7 triliun, sementara PNBPN meningkat Rp4,2 triliun.

Kemudian Mekeu Purbaya juga menyatakan kesetujuannya. "Atas hasil keputusan yang telah diambil dalam pembicaraan tingkat satu ini, pemerintah sepakat untuk dapat dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan terhadap RUU APBN 2026 di sidang paripurna DPR RI," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan kata penutup rapat kerja dengan Banggar DPR, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Purbaya mengatakan, postur APBN yang telah digariskan dalam RUU APBN 2026 akan terus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Izinkan kami atas nama pemerintah menyampaikan

BERIKUT INI POSTUR LENGKAP APBN 2026 YANG MENGALAMI PERUBAHAN.

Pendapatan negara dari Rp 3.147,7 triliun jadi Rp 3.152,6 triliun

- Penerimaan pajak tetap Rp 2.357,7 triliun
- Kepabeanaan dan cukai naik dari Rp 334,3 triliun menjadi Rp 336 triliun
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) naik dari Rp 455 triliun menjadi Rp 459,2 triliun

Belanja negara dari Rp 3.786,5 triliun menjadi Rp 3.842,7 triliun

- Belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) naik dari Rp 1.498,3 triliun menjadi Rp 1.510,5 triliun
- Belanja Non K/L dari Rp 1.638,2 triliun menjadi Rp 1.639,2 triliun
- Transfer ke Daerah naik dari Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun

Keseimbangan primer naik dari defisit Rp 39,4 triliun menjadi Rp 89,7 triliun

Defisit anggaran naik dari Rp 638,8 triliun menjadi Rp 689,1 triliun

Pembiayaan anggaran dari Rp 638,8 triliun menjadi Rp 689,1 triliun

penghargaan dan terima kasih ke Banggar, pimpinan kementerian dan lembaga, wakil pemerintah lainnya. Sinergi yang terjalin menunjukkan sinergi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegas Purbaya.

Postur terbaru RAPBN 2026, defisit APBN bengkak menjadi Rp 689,1 triliun atau setara 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB), dari sebelumnya hanya dirancang Rp 638,8 triliun atau setara Rp 2,48% dari PDB.

Nilai defisit itu terjadi karena anggaran belanja negara menjadi sebesar Rp 3.842,7 triliun dari sebelumnya dirancang hanya senilai Rp 3.786,5 triliun. Sementara itu, pendapatan negara naik sedikit dari Rp 3.147,7 triliun menjadi Rp 3.153,6 triliun. (ant,ist/lut)

KOMISI I DPR MINTA ANGGA MUNDUR DARI WAMEN KOMDIGI

Presiden RI, Prabowo Subianto, melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Di satu sisi, Angga juga masih menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi). Terkait dengan rangkap jabatan tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, meminta supaya Angga mundur dari Wakil Menteri Komdigi.

Tidak hanya rangkap jabatan sebagai Wakil Menteri Komdigi, politikus Partai Gerindra juga menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Sementara, jabatan Kepala BKP menggantikan Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Presidential Communication Office (PCO). Kehadiran Badan Komunikasi Pemerintah diharapkan tidak hanya mewakili komunikasi kantor kepresidenan saja, tetapi juga mewakili semua unsur pemerintahan. Baik pusat dan daerah.

Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical, mengatakan BKP merupakan transformasi dari PCO atau Kantor Komunikasi Presiden. Deng Ical berharap kehadiran BKP di bawah kepemimpinan Angga Raka dapat memperkuat tata kelola komunikasi pemerintah secara menyeluruh.

Namun, kata Deng Ical, sebaiknya Angga mundur dari kursi Wamen Komdigi, karena tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sangat berat. Angga harus mampu menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo dengan tepat dan menyampaikannya secara efektif kepada publik.

"Angga Raka harus betul-betul bisa menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo, sehingga pesan presiden bisa disampaikan dengan baik, jelas, dan tidak menimbulkan kerancuan," ujar mantan Wakil Wali Kota Makassar itu, Kamis (18/9/2025).

Deng Ical juga menekankan bahwa BKP perlu membangun sistem komunikasi yang strategis dan responsif. Menurutnya, informasi aktual dan akurat setiap hari harus mengalir kepada Presiden, agar kepala negara dapat segera

merespons berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

"Setiap hari, BKP harus memberikan informasi aktual kepada presiden. Dengan begitu, presiden bisa mengambil langkah cepat terhadap masalah yang ada," tegas legislator asal Dapil Sulawesi Selatan itu.

Dia menambahkan, selain menyampaikan pesan presiden kepada publik, BKP juga harus mampu membuat perencanaan komunikasi yang matang. Hal ini, kata Deng Ical, sangat penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pesan maupun kerancuan dalam komunikasi pemerintah.

"Badan komunikasi harus menyusun strategi komunikasi yang terencana dengan baik. Dengan begitu, setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami publik secara jelas dan tidak multitafsir," pungkas Deng Ical.

Deng Ical menegaskan bahwa BKP mesti mereduksi informations gap yang muncul karena ego sentris kelembagaan antar kementerian atau lembaga. BKP harus menjadi play maker handal yang membuat ritme penyelenggaraan pemerintahan menjadi tiki taka atau total football, sehingga bisa menghasilkan gol indah dan menag.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan penempatan wakil menteri di kursi komisaris sesuai dengan fungsi dan kebutuhan tugas.

"Sudah pernah kami sampaikan, bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan-penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya," ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

Kemudian, Prasetyo Hadi mencontohkan Wakil Menteri



Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal.

Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

"Contoh misalnya Wamenkomdigi diberi tugas menjadi komisaris utama di Telkom," ucap Menteri Sekretaris Negara, dilansir dari viva.

Sementara itu, Mensesneg menuturkan jika pemerintah akan mengevaluasi jabatan yang kini dipegang Angga Raka. Selain menduduki posisi Wamenkomdigi dan Komisaris Utama PT Telkom Indonesia, Angga juga dipercaya memimpin Badan Komunikasi Pemerintah.

"Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, contoh misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamenkomdigi, itu bagian dari menjalankan kedua fungsi ini supaya lebih maksimal gitu," jelas Prasetyo Hadi.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2025, Angga Raka resmi menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah tanpa melepas posisi Wamenkomdigi.

Selain Angga Raka, tercatat dua wakil menteri lain yang juga merangkap jabatan komisaris BUMN. Mereka adalah Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossi Dermawan, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasaran (Imipias) Silmy Karim yang ditugaskan sebagai Komisaris Telkom.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hal tersebut juga termasuk dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum di Ruang Sidang MK, Kamis (28/8/2025).

"Dengan pertimbangan bahwa

sebagai pejabat negara, wakil menteri harus fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementerian," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Majelis hakim mengabulkan permintaan pemohon lantaran petitem tersebut sesuai dengan pertimbangan putusan mahkamah Nomor 80/PUU-XVII/2019. Dalam putusan Nomor 80, MK melarang rangkap jabatan untuk menteri berlaku juga untuk wakil menteri sebagai satu entitas.

Setelah putusan itu dibacakan pada Agustus 2020, Enny melanjutkan, masih terdapat wamen yang merangkap jabatan. "Itu sebabnya penting bagi MK menegaskan dalam amar putusan a quo ini mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri termasuk sebagai komisaris," ujarnya. (han,rls,ist/lut)



Angga Raka harus betul-betul bisa menerjemahkan pemikiran Presiden Prabowo, sehingga pesan presiden bisa disampaikan dengan baik, jelas, dan tidak menimbulkan kerancuan,"

Syamsu Rizal

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB

Menyoal Data Penerima Bantuan Pangan Beras **BAPANAS MINTA DICEK KEMBALI**

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta keterlibatan pemerintah daerah untuk mengecek kembali data penerima bantuan pangan beras di wilayah masing-masing. Ada apa?

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Sehingga, pihaknya meminta pengecekan kembali data penerima bantuan pangan beras

Ia menekankan agar penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober dan November 2025 bisa tepat sasaran. "Jangan sampai penerima bantuan beras malah diterima pejabat atau keluarga yang berada," kata Arief dalam keterangan tertulis pada Kamis (18/9/2025).

Penyaluran bantuan pangan beras ini menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan sasaran penerima, dengan pendanaan melalui mekanisme Bagian Anggaran. Bendahara. Umum. Negara. (BA BUN) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Arief menyatakan masih ada waktu untuk menyesuaikan data DTSEN, apabila ada koreksi dari daerah.

"Ini masih ada waktu, karena kami sementara masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan. Kira-kira seminggu ini tolong bisa disiapkan pengecekannya," kata Arief.

Sebelumnya, program bantuan pangan beras pada 2025 telah berjalan untuk alokasi dua bulan, yakni Juni dan Juli. Per 17 September, realisasinya penyalurannya mencapai 363,5 ribu ton atau 99,44 persen dari total target 365,5 ribu ton.

Untuk tahap selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan akan melanjutkan bantuan pangan beras selama dua bulan, tepatnya Oktober dan November 2025. Sasaran penerima masih sama, sebanyak 18.277.083 dengan anggaran Rp 7 triliun. Pemerintah akan mengevaluasi apakah penyaluran bantuan pangan beras akan dilanjutkan atau tidak, tergantung tingkat keoptimalan realisasinya.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas beras memberikan andil terbesar terhadap garis kemiskinan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2025, BPS mencatat beras



Sejumlah pekerja mengemas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Gudang Bulog Ternate, Maluku Utara (ANTARA)

berkontribusi sebesar 21,06 persen terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan 24,92 persen di pedesaan.

Banggar Minta Ditambah Migor

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar paket kebijakan stimulus ekonomi untuk Program Bantuan Pangan berupa beras total 10 kg periode Oktober-November 2025, dapat ditambah dengan minyak goreng sebanyak 2 liter, disetujui Menteri Keuangan (Menkeu).

Ketua Banggar DPR RI Said

Abdullah menyampaikan telah melakukan konsultasi dengan para pimpinan DPR RI terkait usulan tersebut, dan akan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 apabila usulan tersebut disetujui.

"Kami barusan berlima (Banggar) berkonsultasi dengan pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan DPR. Agar stimulus yang Rp16,23 triliun, khusus untuk yang 10 kg beras, tidak cukup 10 kg beras, mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter, kalau itu sepakat posturnya sepakat,"

Tambahan Bantuan untuk 20 Juta Masyarakat Miskin

KETUA Banggar DPR, Said Abdullah menyoroti data BPS pada Agustus 2025 yang mencatat bahwa telah terjadi defasi sebesar 0,08 persen secara buanan (mtm).

"Ada indikasi tekanan daya beli yang terjadi di masyarakat. Andil deflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andi inflasinya sebesar 0,08 prsen. komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar itu tomat, 0,10 persen, cabai rawit 0,07 persen," kata Said dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

Oleh karena itu, Said merekomendasikan di APBN 2025, untuk menambah bantuan kepada jumlah penerima manfaat sebanyak 20 juta keluarga.

"Banggar DPR merekomendasikan kepada pemerintah melalui APBN 2025 untuk menambah bantuan, berupa berupa minyak goreng kepada masyarakat rumah tangga miskin dan rentan miskin kepada jumlah penerima manfaat sebanyak 20 juta keluarga" ungkapnya.

Seain itu, Said mengutip Survei konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa Indeks kondisi ekonomi turun dari 106,6 menjadi 105,1 pada Agustus 2025. Begitu pula dengan Indeks keyakinan konsumen dari 118,1 menjadi 117,2 pada Agustus 2025, serta Indeks Ekspektasi Konsumen yang juga turun dari 129,6 menjadi 129,2 pada Agustus 2025.

"Atas dasar angka angka di atas, Banggar DPR bersama pemerintah sepakat bahwa APBN harus berperan penting sebagai kekuatan shock absorber. Sebagai respons cepat menempatkan APBN sebagai peran tersebut, terutama pada tahun 2025, pemerintah telah meluncurkan aloaksi anggaran RP. 16,23 triliun untuk membiayai stimulus untuk mendorong daya beli masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya, Said meminta Menteri Keuangan (Menkeu) untuk mengeluarkan panduan yang jelas agar bank-bank pelat merah tidak hilang arah dalam menggunakan dana SAL Rp200 T.

ujar Said dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Bappenas, di Gedung DPR RI di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Said mengungkapkan, awalnya Banggar DPR RI menginginkan tambahan minyak sebanyak 5 liter untuk dibagikan bersama dengan bantuan beras 10 kg, namun, tidak jadi karena perhitungannya tidak akan sesuai dengan maksud dari bantuan awal yang digelontorkan pemerintah. (wid,rls,ant/dya)

Bantuan Beras hingga Desember 2025

- 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- Masing-masing menerima 10 kg beras/bulan
- Total anggaran mencapai Rp13,9 triliun

Harga Beras SPHP untuk Semua Wilayah

- Zona 1**
Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi : Rp 12.500/kg
- Zona 2**
Sumatera (selain Lampung & Sumsel), NTT, dan Kalimantan : Rp 13.100/kg
- Zona 3**
Maluku dan Papua : Rp 13.500/kg



"Perlu guidance (petunjuk) lah. Guidance-nya apa? Melalui PMK. Sebab kalau kita di guidance-nya, kalau itu yang Rp200 triliun diambil korporasi, dampak ekonominya ke bawahnya kan tidak ada," kata Said Abdullah, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2025).

Menurut Said, calon penerima pinjaman atau partner juga harus jelas sehingga harus diatur dalam PMK. "Saya kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, sebagai partner, mitra, Badan Anggaran DPR, seyogianya ada PMK yang mengatur terhadap siapa saja yang berhak mendapatkan pinjaman Rp200 triliun tersebut," kata dia (wid,rls,ant/dya)

SEMINGGU JADI MENKEU, PURBAYA HADAPI GUGATAN TUTUT SOEHARTO

Belum genap seminggu duduk di kursi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa sudah dihadapkan pada perkara hukum. Putri sulung Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut, melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pencegahan ke luar negeri terhadap dirinya.

Putri Presiden ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana, alias Tutut Soeharto menggugat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta.

Objek gugatan yang dipersoalkan Tutut adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/MK/KN/2025 tertanggal 17 Juli 2025. Dokumen itu berisi pencegahan ke luar negeri terhadap dirinya. Dalam pertimbangannya, Kementerian Keuangan menilai Tutut merupakan penanggung utang dua perusahaan, PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP) dan PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP). Kedua perusahaan itu disebut masih menanggung kewajiban kepada negara, warisan panjang dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang meledak lebih dari dua dekade silam.

BLBI adalah program penyelamatan bank di tengah krisis moneter 1998 yang belakangan berubah menjadi salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Ratusan triliun rupiah dana negara menguap, sebagian besar tak pernah kembali. Pemerintah membentuk Satgas BLBI untuk menagih piutang dari para obligor, termasuk perusahaan yang diduga terkait dengan keluarga Cendana. Tutut menjadi salah satu nama yang disebut sebagai penanggung utang, sehingga pemerintah mengeluarkan keputusan pencegahan bepergian.

Namun, gugatan yang baru didaftarkan itu disebut tidak bertahan lama. Purbaya mengklaim Tutut sudah mencabutnya. "Bu Tutut sudah cabut gugatannya, malah kirim salam ke saya," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (18/9/2025).



Menkeu,
Purbaya Yudhi
Sadewa



Tutut
Soeharto

Pernyataan itu membuat isu gugatan seakan hanya singgah sebentar di meja PTUN.

PTUN Membantah

Di laman resmi PTUN, perkara dengan nomor 308/G/2025/PTUN. JKT itu masih tercatat dan sidang pemeriksaan persiapan tetap dijadwalkan pada 23 September mendatang. Artinya, tanpa dokumen resmi pencabutan, perkara itu berpotensi tetap berlanjut.

PTUN Jakarta membantah Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto telah mencabut

gugatannya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Sampai saat ini belum ada informasi ke PTUN. (Status perkara) Menunggu proses pemeriksaan persiapan ya," ujar juru bicara PTUN Jakarta, Febriana Permadi.

Menurut dia, PTUN Jakarta masih akan terus melanjutkan proses gugatan selama tak ada perubahan, termasuk pencabutan perkara. Meski demikian, dia menilai, majelis hakim pun belum memulai pemeriksaan persiapan pada perkara tersebut.

"Sehingga, saat ini masih dalam tahapan panggilan para pihak (Tutut

dan Kemenkeu), kata Febriana.

Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Menteri Keuangan telah menyatakan Tutut sebagai penanggung utang PT Citra Mataram Satriamarga Persada dan PT Citra Bhakti Margatama Persada karena diklaim memiliki utang kepada negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Atas adanya klaim dari Tergugat [Menteri Keuangan] yang menyatakan Penggugat [Tutut] memiliki utang kepada negara tersebut, kemudian Tergugat [Menteri Keuangan] menerbitkan objek gugatan," sebagaimana dikutip melalui SIPP.

Atas adanya objek gugatan tersebut, Tutut dicekal atau tidak dapat bepergian keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, hal itu merugikan dan mencederai kepentingan hukumnya. Padahal, kata Tutut, klaim utang negara tersebut kepadanya adalah tidak berdasar atas hukum. (wid,rls,ant/dya)

Isi Gugatan soal Pencegahan ke Luar Negeri

SITI Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto menggugat menteri keuangan (menkeu) ke PTUN Jakarta karena aturan yang melarangnya ke luar negeri akibat utang ke negara.

Isi gugatan itu tercantum dalam cuplikan layar. Cuplikan itu telah dikonfirmasi Pejabat Humas PTUN Jakarta Febriana Permadi.

"Bahwa tergugat telah menyatakan penggugat sebagai penanggung utang PT Citra Mataram Satriamarga Persada (PT CMSP) dan PT Citra Bhakti Margatama Persada (PT CBMP) karena diklaim memiliki utang kepada negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia," bunyi poin gugatan Tutut Soeharto tersebut.

Pada bagian petitum, Tutut Soeharto meminta PTUN Jakarta menyatakan menkeu melakukan perbuatan melanggar hukum. Ia juga meminta pengadilan membatalkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

266/MK/KN/2025 yang menjadi dasar pelarangannya ke luar negeri.

Tutut juga memohon agar PTUN Jakarta memerintahkan menkeu mencabut aturan itu.

"Mewajibkan, menghukum, atau memerintahkan turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada amar putusan a quo, yaitu dengan mencabut, menghapus, atau menghilangkan data penggugat dari basis data pencekalan bepergian ke luar negeri pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI, paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)," bunyi poin tuntutan Tutut.

Meski membenarkan isi gugatan dalam cuplikan layar yang diterima tersebut, tetapi Pejabat Humas PTUN Jakarta Febriana Permadi mengingatkan perkara ini belum masuk pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan baru digelar

DUDUK PERKARA GUGATAN TUTUT SOEHARTO KE MENTERI KEUANGAN

17 JULI 2025

Menteri Keuangan (saat itu masih dijabat Sri Mulyani) menerbitkan Keputusan Nomor 266/MK/KN/2025 yang melarang Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana (Tutut Soeharto) bepergian ke luar negeri dalam rangka pengurusan piutang negara.

12 SEPTEMBER 2025

Tutut Soeharto resmi mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta dengan nomor perkara 308/G/2025/PTUN.JKT. Tutut sebagai penggugat, sementara tergugat adalah Menteri Keuangan.

23 SEPTEMBER 2025 (JADWAL AWAL SIDANG)

PTUN menetapkan agenda pemeriksaan persiapan perdana pada tanggal ini.

18 SEPTEMBER 2025

-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Tutut telah mencabut gugatannya di PTUN. Namun, pihak PTUN Jakarta menyebut belum bisa memastikan pencabutan tersebut karena sidang pemeriksaan perkara belum dimulai.

-PTUN Jakarta membantah Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto telah mencabut gugatannya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

23 September mendatang.

"Iya betul. Namun, belum dilaksanakan pemeriksaan persiapan ya," ujar Febriana, Kamis (18/9/2025). (wid,ist/dya)

MALANG RAYA KAJI SYARAT BARU PROYEK ENERGI LISTRIK DARI SAMPAH, BUTUH 2.000 TON/HARI

MALANG - Rencana proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Malang Raya masih dalam tahap kajian. Hal ini menyusul keluarnya aturan baru yang menetapkan syarat minimal 2.000 ton sampah per hari.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH) untuk memastikan kelanjutan proyek tersebut.

"Karena ada surat perkembangan baru yang menetapkan minimal 2.000 ton, sampai sekarang kami masih intensif berkoordinasi," ujar Raymond, Kamis (18/9/2025).

Raymond menjelaskan, rencana awal proyek PSEL aglomerasi Malang Raya, akan berlokasi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang, Kota Malang, dengan kebutuhan 1.000 ton sampah per hari.

Untuk memenuhi target tersebut, menurutnya, DLH Kota Malang

diinstruksikan menjalin kerja sama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang.

"Di Kota Malang sendiri, sampah yang dihasilkan per hari sekitar 720 ton, dan yang masuk ke TPA hanya 514 ton. Sisanya dikelola di Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST) dan TPS3R," jelas Raymond.

Dengan aturan baru, disebutnya, kebutuhan minimal proyek meningkat menjadi 2.000 ton sampah per hari. Raymond mengatakan, pihaknya masih menyampaikan telaah kepada Wali Kota Malang terkait kemungkinan pemenuhan jumlah tersebut.

"Kalau 2.000 ton, sepertinya Malang Raya tidak tercapai, meskipun sudah melibatkan Kota/Kabupaten Malang dan Kota Batu," tambahnya.

Selanjutnya, dengan kapasitas 1.000 ton, proyek PSEL diproyeksikan menerima kontribusi sampah sekitar 520 ton dari Kota Malang, 400 ton dari Kabupaten Malang, dan 50 ton dari Kota Batu per hari.

Raymond menyampaikan, hasil rapat terakhir antara Menteri

Lingkungan Hidup dan tiga kepala daerah Malang Raya, juga telah menyepakati lokasi proyek PSEL berada di TPA Supit Urang, dengan luas area 5 hektare di dalam TPA.

Namun, dengan munculnya aturan baru tersebut, DLH Kota Malang masih melakukan koordinasi intensif. Raymond menambahkan, keputusan final mengenai penggunaan TPA Supit Urang sebagai lokasi proyek ini belum 100 persen.

Menurutnya, seluruh kajian dan koordinasi dilakukan agar proyek dapat berjalan sesuai syarat baru dan kebutuhan daerah. Serta untuk menghindari ketidaksesuaian dalam implementasi di lapangan.

Raymond juga menegaskan masih menunggu keputusan akhir dari



Ilustrasi: Pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang Kota Malang. (Santi/Lentera)

koordinasi dengan pusat. Masih belum dipastikan apakah pengolahan sampah di Malang Raya akan dilakukan melalui proyek PSEL. Atau melalui proyek Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) yang menghasilkan Refuse Derived Fuel (RDF)..(Santi/Dya)

DPRD SEBUT POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN AIR TAWAR KABUPATEN MALANG BESAR



Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarrok. (dok. ist)

MALANG - DPRD Kabupaten Malang meminta pemerintah daerah memperkuat sektor peternakan dan perikanan. Hal ini disampaikan karena kedua sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Sekaligus menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten

Malang, Alayk Mubarrok, menyebut sektor peternakan di Kabupaten Malang sangat strategis untuk dikembangkan. Pasalnya, ketersediaan lahan dan kondisi wilayah mendukung produktivitas berbagai jenis ternak.

"Peternakan sangat strategis untuk dikembangkan di Kabupaten Malang. Karena sapi, kambing, rumpun, termasuk ayam itu kan semuanya mudah," ujar Alayk, dikutip pada Kamis (18/9/2025).

Dijelaskannya, wilayah Kabupaten Malang yang luas dengan karakteristik geografis beragam, dinilai sangat mendukung pengembangan ternak.

Seperti di daerah dataran tinggi, yakni Pujon, Ngantang, dan Poncokusumo misalnya, disebut memiliki suhu udara yang sejuk sehingga cocok untuk pengembangan sapi perah maupun kambing.

Sementara itu, wilayah dataran rendah seperti Kepanjen atau Pakisaji lebih sesuai untuk budidaya ayam pedaging dan ayam petelur. "Kemudian ketersediaan lahan hijau yang cukup luas juga mendukung penyediaan pakan ternak secara alami," katanya.

Selain peternakan, Alayk menilai sektor perikanan air tawar juga dinilai memiliki prospek besar. Beberapa daerah di Kabupaten Malang, menurutnya bahkan pernah menjadi sentra perikanan, seperti Maguan di Kecamatan Ngajum yang dikenal sebagai lokasi pembenihan dan pembesaran ikan.

"Sekarang kan banyak orang-orang di pemukimannya melakukan budidaya perikanan air tawar atau perikanan darat. Nah potensi-potensi seperti ini, yang maksud kami harus diperkuat dan bisa direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Malang," katanya.

Menurutnya, penguatan budidaya perikanan air tawar tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

Alayk menambahkan, DPRD

Kabupaten Malang telah menyampaikan kepada Dinas Perikanan agar memperluas bantuan kepada masyarakat. Bentuk dukungan itu antara lain penyediaan benih, pakan, dan fasilitas pendukung kegiatan budidaya.

"Kami di dewan sudah menyampaikan ke Dinas Perikanan, salah satunya melalui pokok pikiran. Nanti kami rekomendasikan bantuan perikanan, seperti pembuatan kolam, bioflok, bantuan benih, bantuan pakan, termasuk alat. Kami meminta dinas membuka peluang itu agar dewan bisa memberikan sumbangsih nyata," jelasnya.

Ia menekankan, jika dua hal tersebut diperkuat, maka ketersediaan pasokan dari peternakan dan perikanan lokal akan sangat penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis.

"Menu-menu pada program makan bergizi gratis nantinya akan dalam jumlah besar. Tentu butuh telur, ayam, daging, ikan. Ini sebisa mungkin ditopang oleh peternak dan pembudidaya ikan dari Kabupaten Malang. Jangan sampai permintaan tinggi, supply rendah," pungkasnya. (Santi/Dya)

ISRAEL MENGGILA, AS-ARAB SAUDI GELAR LATIHAN MILITER ANTIDRONE

Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi baru saja menuntaskan latihan militer bersama yang berlangsung di kawasan Timur Tengah pada pekan ini. Kegiatan tersebut mencakup latihan tembak langsung sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan menghadapi sistem udara tak berawak (UAS) atau ancaman serangan drone.

Latihan bersama antara kedua negara sekutu ini menegaskan semakin pentingnya kesiapan pertahanan menghadapi ancaman drone yang terus berkembang.

Komando Pusat AS atau CENTCOM, seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (18/9/2025), menyebut latihan gabungan ini sebagai latihan "Red Sands" yang paling ambisius sejauh ini, dengan mempertemukan 20 sistem kontra-drone dalam latihan tembak langsung di Lapangan Latihan Shamal-2 di wilayah timur laut Saudi.

Latihan ini disebut fokus pada pengintegrasian radar, sensor, dan senjata untuk mendeteksi, melacak, serta menghancurkan ancaman udara modern dengan cepat, termasuk kawanan drone.

Di antara kemampuan yang diuji coba, pasukan AS dan Saudi mengintegrasikan sistem komando dan kontrol, serta penembak yang mampu menghancurkan kawanan drone. Hal serupa telah berhasil dilakukan militer Ukraina dalam melumpuhkan pertahanan udara Rusia.

CENTCOM menyebut bahwa "Drone Defeat Rounds" atau DDR ditembakkan dari senapan kaliber-12, setiap peluru melepaskan 729 pelet tungsten yang lebih padat daripada pelet timah yang menghasilkan energi kinetik yang jauh lebih besar.

Pesawat jenis rotary-wing dan fixed-wing juga dilibatkan dalam latihan gabungan tersebut, bersama dengan pesawat AC-130 dan helikopter Apache AH-64, serta jet-jet tempur Saudi jenis F-15, AH-64 dan Typhoon.

Laksamana Brad Cooper, yang melakukan kunjungan regional pertamanya sejak menjabat sebagai komandan CENTCOM, mengawasi langsung latihan gabungan itu bersama Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Saudi, Jenderal Fayyadh Al-Ruwaili, dan mengunjungi Pusat Eksperimen Terpadu Red Sands.

Cooper juga melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Saudi, Pangeran Khalid bin Salman.

"Dalam pertemuan tersebut, kami

meninjau aspek-aspek kerja sama pertahanan dan membahas perkembangan terbaru di kawasan, serta upaya bersama dalam mengatasinya dengan cara yang menjaga perdamaian dan keamanan internasional," kata Pangeran Khalid merujuk soal pertemuannya dengan Cooper.

Dalam pernyataannya, Cooper menyebut AS dan Saudi "bahu-membahu" untuk "berinovasi dan beradaptasi" dalam menghadapi ancaman yang muncul.

"Ancaman yang ditimbulkan oleh maraknya penggunaan drone canggih merupakan tantangan yang



Laksamana Brad Cooper, yang melakukan kunjungan regional pertamanya sejak menjabat sebagai komandan CENTCOM, mengamati latihan tersebut bersama Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Saudi, Jenderal Fayyadh Al-Ruwaili. (CENTCOM)

mendesak," sebutnya.

"Bekerja sama bahu-membahu dengan mitra-mitra regional untuk berinovasi dan beradaptasi menjadi lebih penting dari sebelumnya," cetus Cooper.

AS dan Saudi juga menggelar serangkaian latihan keamanan maritim bersama pada awal tahun ini, yang menandai langkah maju lainnya dalam memperdalam kemitraan militer antara kedua negara. (Al Arabiya, ist/nei)

Pakistan Teken Pakta Pertahanan Baru

PAKISTAN dan Arab Saudi resmi menandatangani pakta pertahanan bersama pada Rabu (17/9/2025), sebuah langkah yang memperkuat hubungan kerja sama keamanan antara kedua negara secara signifikan.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Pakistan, Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), bersama Perdana Menteri Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, menandatangani "Perjanjian Pertahanan Strategis Bersama" yang menandai tekad kedua negara untuk memperkuat keamanan serta mendukung upaya perdamaian di kawasan dan tingkat global.

"Perjanjian ini, yang mencerminkan komitmen bersama kedua negara untuk meningkatkan keamanan mereka dan untuk mencapai keamanan dan perdamaian di kawasan dan dunia, bertujuan untuk mengembangkan aspek kerja sama pertahanan antara kedua negara dan memperkuat

pencegahan bersama terhadap setiap agresi," demikian pernyataan bersama Saudi dan Pakistan.

"Perjanjian tersebut menyatakan bahwa setiap agresi terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya," lanjut pernyataan bersama tersebut.

Dikutip dari Saudi Press Agency (SPA), pakta pertahanan ini ditandatangani saat Sharif melakukan kunjungan kenegaraan ke Riyadh dan bertemu dengan MBS.

Selama pertemuan tersebut, kedua pemimpin meninjau hubungan erat kedua negara dan membahas berbagai cara guna meningkatkan kemitraan strategis di berbagai bidang.

"Mereka juga bertukar pandangan tentang perkembangan regional dan internasional, isu-isu kepentingan bersama, serta upaya yang bertujuan mencapai keamanan dan stabilitas," demikian keterangan SPA.

Dikutip dari Al Jazeera, kesepakatan ini dibuat dua hari setelah negara Arab-Islam

Hubungan Arab Saudi - Israel

- **1948-1970an: Penolakan Total**
Saudi menolak berdirinya Israel, ikut perang Arab-Israel, dan gunakan embargo minyak sebagai tekanan.
- **1980an-1990an: Awal Diplomasi**
Muncul Rencana Perdamaian Fahd (1981), Perjanjian Oslo (1993), serta kontak rahasia terkait keamanan regional.
- **2000an: Inisiatif Perdamaian Arab**
Saudi tawarkan normalisasi jika Palestina merdeka (2002), tapi Israel menolak.
- **2010an: Kontak Rahasia & Isu Iran**
Hubungan "bawah meja" makin nyata, didorong ancaman bersama dari Iran.
- **2020-2022: Bayangan Abraham Accords**
UEA & Bahrain normalisasi dengan Israel, Saudi mulai terbuka terbatas (izin jalur udara). AS dorong normalisasi resmi.
- **2023-2025: Tertunda Karena Gaza**
Negosiasi normalisasi sempat intens, namun terhenti akibat perang Gaza (2023). Hingga 2025, Saudi masih menunda dan menegaskan syarat kemerdekaan Palestina.



menggelar pertemuan darurat menyusul serangan Israel di ibu kota Doha, Qatar, pada 9 September lalu. Negara Arab-Islam saat itu kompak mengutuk serangan Israel.

Pakistan dan Saudi memiliki hubungan dagang dan militer yang erat selama puluhan tahun. Sejak 1967, Pakistan melatih lebih dari 8.200 personel angkatan bersenjata Saudi. Kedua negara juga kerap mengadakan latihan militer bersama. (Saudi Press Agency, Al Jazeera, ist/nei)

Tanpa Sadar, Hal Kecil Ini Bisa Ganggu Kesehatan Mental

Banyak orang sudah disiplin menjaga pola makan, rutin berolahraga, hingga telaten merawat diri, namun kerap mengabaikan kesehatan mental. Padahal, gangguan tidak selalu datang dari hal-hal besar atau ekstrem, melainkan dari kebiasaan kecil yang perlahan menggerogoti pikiran. Seperti tetesan air yang terus-menerus menghantam batu, kebiasaan ini tanpa terasa mampu melemahkan kekuatan batin dari waktu ke waktu.

Menyadari kebiasaan kecil yang tampak wajar namun diam-diam merusak kesehatan mental adalah langkah penting untuk tetap tangguh dan jernih dalam berpikir. Kesadaran ini membuka peluang untuk memperbaiki pola hidup sejak dini, sebelum efeknya berkembang menjadi lebih berat dan sulit diatasi. Dengan begitu, kita dapat menjaga ketahanan diri sekaligus kewarasan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Mengabaikan Pentingnya Jeda

Banyak orang yang tidak nyaman dengan keheningan. Lalu, setiap ruang kosong diisi dengan notifikasi, musik keras, atau percakapan tanpa arah. Terlihat biasa, tetapi kebiasaan ini membuat pikiran kehilangan kesempatan untuk beristirahat.

Padaahal, diam adalah ruang bernapas bagi mental. Saat kita menolak keheningan, otak dipaksa bekerja terus-menerus mencerna rangsangan. Akibatnya, sistem emosi menjadi mudah lelah dan sulit fokus. Jangan sampai takut menghadapi sepi.

Membandingkan-bandingkan Diri

Perbandingan kecil yang dilakukan setiap hari, meski hanya sekilas, bisa menjadi racun psikologis. Melihat pencapaian orang lain di media sosial, lalu menimbang hidup sendiri, sering kali membuat hati terasa

kurang meski sebenarnya cukup. Kebiasaan ini berbahaya karena menciptakan standar palsu yang tidak ada hubungannya dengan realitas hidupmu. Setiap orang berjalan dengan ritme berbeda, tetapi membandingkan diri akan menyeret mental ke lingkaran iri, cemas, dan minder. Jauh lebih sehat jika membandingkan diri dengan versi dirimu yang lalu, bukan dengan kehidupan yang hanya ditampilkan setengah di layar orang lain.

Memendam Emosi dan Perasaan

Banyak orang mengira hanya amarah besar yang berbahaya. Padahal, emosi kecil yang dipendam tanpa dikelola—rasa kesal, kecewa, atau tersinggung ringan—jika terus menumpuk bisa menjadi beban mental yang berat.

Emosi tidak hilang hanya karena kita berpura-pura tidak merasakannya. Ia tetap ada, mengendap, dan mencari cara untuk meledak di waktu yang tak terduga. Hasilnya bisa berupa letupan marah, sindiran tajam, atau bahkan kelelahan emosional yang parah.

Mengabaikan Pentingnya Rehat

Ada kebiasaan yang sering dianggap produktif, padahal berbahaya: terus-menerus menyibukkan diri. Ketika tubuh meminta istirahat, pikiran dipaksa mencari aktivitas agar tidak merasa “kalah” dengan waktu.

Kebiasaan ini justru membuat mental tidak punya kesempatan untuk pulih. Otak bekerja melebihi kapasitas, sementara hati menanggung rasa

lelah yang sulit dijelaskan. Lambat laun, yang tersisa hanyalah kekosongan meski terlihat sibuk. Memberi ruang untuk tidak melakukan apa-apa bukan tanda malas, melainkan cara cerdas menjaga kewarasan dan energi batin.

Terlalu Banyak Mengeluh

Tidak semua racun mental datang dari hal buruk. Kadang, justru datang dari kebiasaan mengabaikan hal baik yang kecil. Tidak menghargai sarapan sederhana, udara segar, atau obrolan hangat dengan sahabat membuat jiwa terasa miskin, meski hidup sebenarnya penuh.

Mengabaikan rasa syukur membuat hati terjebak pada pencarian tanpa ujung. Selalu ada yang kurang, selalu ada yang ingin lebih. Pada akhirnya, mental terus tertekan karena merasa tidak pernah cukup.

Membiasakan diri menyadari hal kecil yang layak disyukuri bisa menjadi penawar paling ampuh bagi rasa gelisah dan kesepian.

Menghindari Konflik Kecil

Banyak orang memilih untuk menghindari setiap kali ada perbedaan kecil dengan orang lain. Sekilas memang terlihat lebih damai karena suasana bisa tetap tenang, tetapi pada kenyataannya, menghindari konflik justru dapat menggerogoti kesehatan mental secara perlahan. Rasa tidak nyaman yang tidak pernah diselesaikan akan terus tersimpan di dalam hati, menumpu

k, lalu berkembang menjadi kecemasan tersembunyi yang sulit dikendalikan.

Menghindar berarti membiarkan orang lain menentukan batasanmu. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat rasa harga diri terkikis sedikit demi sedikit, karena kamu terbiasa mengorbankan kebutuhan dan perasaan pribadi demi mempertahankan kenyamanan semu.

Terjebak pada Pola Bicara Negatif

Kebiasaan berbicara, meski hanya berupa kalimat-kalimat kecil, punya dampak yang sangat besar bagi jiwa. Ucapan sederhana seperti “aku memang selalu salah” atau “hidupku memang begini adanya” jika diulang terus-menerus tanpa disadari akan membentuk keyakinan batin yang merusak.

Kata-kata itu akhirnya berubah menjadi sugesti yang diterima otak, lalu membuatmu merasa tidak berharga, tidak mampu, bahkan tidak pantas untuk berjuang lebih baik. Pola bicara negatif inilah yang sering kali menjadi awal munculnya rasa rendah diri, kecemasan, hingga depresi. Jika tidak disadari, seseorang bisa terjebak dalam lingkaran keyakinan yang melemahkan mental dan membuat hati rapuh.

Karena itu, mengganti kalimat dengan bahasa yang lebih positif bukanlah tindakan berpura-pura bahagia, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Bahasa yang sehat akan menolong pikiran agar tetap kuat, menjaga keteguhan hati, dan membuka ruang bagi keyakinan baru yang lebih membangun.

Saatnya kita lebih memberi perhatian serius pada kesehatan mental. Kebiasaan-kebiasaan yang tampak sepele, seperti menghindari konflik kecil atau membiarkan diri tenggelam dalam pola bicara negatif, ternyata dapat berdampak besar terhadap kesejahteraan diri. Jika dibiarkan, hal-hal ini bisa menjadi penghalang bagi kebahagiaan dan kedamaian hidup.

(nei,ist/dya)



UEA LUNCURKAN LLM K2 THINK, BIDIK DOMINASI AI GLOBAL

Universitas Mohamed bin Zayed untuk Kecerdasan Buatan (MBZUAI), sebuah institusi riset berbasis AI yang didirikan Uni Emirat Arab, mengumumkan peluncuran model penalaran baru dengan biaya rendah yang ditujukan untuk bersaing dengan OpenAI dan DeepSeek.

Situasi ini muncul setelah DeepSeek, laboratorium AI asal Tiongkok, meluncurkan model penalaran bernama R1 yang diklaim mampu melampaui OpenAI, meski dengan biaya operasional yang lebih tinggi.

Dengan kapasitas hanya 32 miliar parameter, model besutan MBZUAI yang diberi nama K2 Think ini berukuran jauh lebih kecil dibandingkan sistem milik OpenAI maupun DeepSeek.

Model ini dibangun di atas sistem Qwen 2.5 open source Alibaba dan dijalankan serta diuji pada perangkat keras yang disediakan chip AI Cerebras.

Sebagai konteks, R1 DeepSeek memiliki total

671 miliar parameter, yang pada dasarnya merupakan istilah lain variabel yang dipelajari oleh model bahasa AI untuk memahami dan menghasilkan bahasa. Sedangkan untuk OpenAI tidak mengungkapkan jumlah parameter nya.

K2 Think dikembangkan melalui kemitraan dengan G42, perusahaan AI yang berbasis di UEA yang didukung oleh raksasa teknologi AS, Microsoft.

Para peneliti di balik nya mengatakan bahwa model ini memberikan kinerja yang setara dengan model penalaran unggulan OpenAI dan DeepSeek, meskipun ukurannya jauh lebih kecil.

Hector Liu, direktur Institut Model Pondasi MBZUAI, mengatakan bahwa tim di balik K2 Think mampu mencapai tingkat kinerja tinggi dengan menggunakan sejumlah metode.

"Yang istimewa dari model kami

adalah kami memperlakukannya lebih seperti sebuah sistem, bukan sekedar model," kata Liu, dikutip CNBC.

"Jadi tidak seperti model sumber terbuka biasa di mana kami bisa langsung merilis modelnya, kami langsung menerapkannya dan melihat bagaimana kami dapat menyempurnakannya seiring waktu."

Ada dua negara di panggung dunia yang menonjol sebagai pelopor dalam perlombaan AI, yaitu AS dan China.

Raksasa teknologi Amerika seperti OpenAI memimpin momentum awal dengan apa yang disebut model pondasi, yang bertujuan untuk memenuhi berbagai tugas dengan mengandalkan data pelatihan dalam jumlah besar.

Namun, terobosan DeepSeek dengan R1 awal tahun ini telah memperkuat posisi China sebagai pemimpin AI yang Tangguh. Kini,

UEA berupaya memposisikan dirinya sebagai pemimpin global dalam AI.

Hal ini

merupakan upaya meningkatkan pengaruh geopolitik nya dan mendiversifikasi ekonominya di luar ketergantungan minyak mentah.

Terdapat juga kompleksitas geopolitik yang menyelimuti ambisi AI UEA. Investasi dan kemitraan Microsoft dengan G42 tahun lalu menarik perhatian besar di AS terkait hubungan perusahaan tersebut dengan China.

Industri AI UEA masih memiliki jalan panjang untuk mencapai skala yang sama dengan rekan-rekannya di AS dan China.

Secara lebih luas, industri AI UEA masih memiliki jalan panjang untuk mencapai skala yang sama dengan rekan-rekannya di AS dan China. OpenAI dan para pemain Big Tech telah menikmati awal yang baik dengan model AI dasar mereka masing-masing.

Meskipun K2 Think menunjukkan kinerja yang setara dengan OpenAI, para pengembang sistem mengatakan tujuannya bukanlah untuk membangun chatbot seperti ChatGPT.

"Faktanya, penalaran fundamental otak manusia merupakan landasan dari seluruh proses berpikir," ujar Richard Morton, direktur pelaksana Institute of Foundation Models di MBZUAI.

"Dengan aplikasi khusus ini, alih-alih membutuhkan waktu lima tahun bagi 1.000 dan 2.000 manusia untuk memikirkan pertanyaan tertentu, atau menjalani serangkaian uji klinis tertentu, atau semacamnya, ini justru mempersingkat waktu tersebut."

Hal ini juga dapat memperluas jangkauan teknologi AI canggih di wilayah-wilayah yang tidak memiliki akses ke jenis modal dan infrastruktur yang dimiliki perusahaan-perusahaan AS. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Desa Adat, Cermin Unik Kekayaan Budaya Nusantara

Keragaman budaya Indonesia memang tiada tandangnya. Kekayaan yang dimiliki negeri ini seakan tidak pernah habis untuk dikaji. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing, termasuk desa adat yang unik. Untuk lebih mengenal keragaman budaya Indonesia, wisatawan dapat berkunjung ke desa-desa adat yang tersebar di berbagai daerah. Berikut beberapa desa adat di Indonesia yang memiliki keunikan dan layak menjadi tujuan wisata.

Kampung Naga, Tasikmalaya

Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat adat Sunda khas Jawa Barat yang masih terjaga secara tradisional, dapat mengunjungi salah satu desa adat di Indonesia ini. Kampung Naga yang terletak di Tasikmalaya tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga menyuguhkan pemandangan asri nan hijau yang berpadu dengan rumah-rumah penduduk berarsitektur tradisional.

Kampung Wae Rebo, Nusa Tenggara Timur

Kampung Wae Rebo layak masuk dalam daftar destinasi wisata kampung adat berikutnya. Kampung ini telah ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Sebagai warga Indonesia, tentu penting untuk mengenal dan mengunjungi kampung adat yang bernilai sejarah ini. Meskipun terletak di Nusa Tenggara Timur, nenek moyang masyarakat Wae Rebo berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang dikenal dengan sebutan Empo Maro. Empo Maro bersama kerabatnya

kemudian berlabuh di Flores dan menetap di Wae Rebo.

Beberapa hal yang membuat Kampung Wae Rebo unik dan patut untuk dikunjungi adalah kampung ini memiliki iklim sejuk karena terletak di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Keunikannya semakin terlihat dari rumah adat berbentuk kerucut yang selalu berjumlah tetap, yakni tujuh bangunan.

Desa Adat Suku Baduy, Banten

Di Pulau Jawa terdapat salah satu desa adat di Indonesia yang cukup terkenal, yaitu Desa Adat Suku Baduy di Banten. Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar. Untuk mencapai Desa Baduy Dalam, pengunjung perlu menempuh perjalanan dengan berjalan kaki selama kurang lebih lima jam melalui medan yang cukup menanjak.

Urang Kanekes atau masyarakat Suku Baduy juga sangat memegang penuh kepercayaan leluhur. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat mengunjungi desa adat Indonesia satu ini, seperti di kawasan ini berlaku beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengunjung. Wisatawan dilarang memotret tanpa izin, mengambil hasil alam secara sembarangan, serta menggunakan sabun, sampo, maupun pasta gigi yang dapat mencemari lingkungan.

Desa Adat Sijunjung, Sumatera Barat

Apabila tertarik mempelajari budaya Sumatera Barat, berkunjung ke Desa Adat Sijunjung dapat menjadi pilihan yang tepat. Lokasi kampung

adat ini berada sekitar 120 kilometer dari pusat Kota Padang.

Desa Adat Sijunjung dihuni oleh enam suku berbeda, namun seluruh suku tersebut memiliki rumah adat dengan bentuk serupa. Di kawasan perkampungan adat ini terdapat 76 rumah yang mengusung arsitektur khas Minangkabau. Keunikannya, jumlah rumah di desa adat ini selalu tetap, seakan-akan kawasan tersebut tidak mengalami pertumbuhan ekonomi. Bahkan, jumlah tersebut bertahan sejak tahun 1950-an hingga saat ini.

Desa Sade, Lombok

Kurang lengkap rasanya berkunjung ke Pulau Lombok tanpa menyempatkan diri berwisata ke Desa Adat Sade. Meskipun lokasinya berada di tepi jalan raya dan telah tersentuh teknologi modern, masyarakat setempat tetap mempertahankan budaya leluhur. Salah satu tradisi yang masih dijaga adalah kebiasaan "menculik" calon pengantin perempuan sebelum pernikahan. Seorang perempuan di desa ini baru dapat menikah dan dianggap dewasa apabila telah mampu menenun kainnya sendiri.

Rumah-rumah di desa adat ini tampak sederhana dengan atap yang terbuat dari daun kering. Menariknya, ketika memasuki rumah, pengunjung akan mendapati bahwa lantai bangunan tersebut dibuat menggunakan campuran kotoran sapi.

Desa Kete Kesu, Sulawesi Selatan

Desa adat di Indonesia selanjutnya terletak di Tana Toraja dan menyimpan peninggalan leluhur yang telah ada sejak lebih dari 500 tahun lalu. Bagi

Anda yang ingin mempelajari lebih

dalam mengenai kebudayaan Toraja, Desa Kete Kesu layak masuk ke dalam daftar tujuan wisata desa adat yang dikunjungi. Berbeda dengan proses pemakaman pada umumnya, jenazah di desa adat ini ditempatkan di sebuah pemakaman berbentuk goa batu. Pemakaman tradisional tersebut dipenuhi tulang belulang warga yang telah meninggal, lengkap dengan peti mati berukir khas Toraja. (nei,ist/dya)



Kampung Naga, Tasikmalaya



Desa Sade, Lombok



Desa Adat Sijunjung, Sumatera Barat



Desa Adat Suku Baduy, Banten

Lagi, Ratusan Siswa ...dari hal 1

Melihat kasus keracunan MBG yang terus terjadi, Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, menyebut peristiwa itu menunjukkan lemahnya pengawasan dari instansi berwenang.

"Diperparah lagi dengan pengawasan yang lemah menyebabkan tidak hanya program MBG tidak berjalan efektif, tetapi juga menimbulkan persoalan baru yakni munculnya kasus-kasus keracunan," kata Baharuddin, Kamis (18/9/2025).

Menurut dia, dilansir dari Kompas, perlu ada pengawasan independen dari lembaga eksternal seperti Ombudsman agar kualitas makanan dalam program MBG benar-benar transparan dan akuntabel.

"Jika Badan Gizi Nasional (BGN) belum memiliki Standar Operational Procedure (SOP) untuk melakukan pengawasan proyek MBG, maka segera dibuat dan disosialisasikan ke masyarakat termasuk pihak sekolah," ujarnya.

Sebelumnya, puluhan siswa MTsN 2 Sumbawa mengalami muntah, mual, dan diare usai menyantap menu MBG yang dikelola dapur SPPG setempat. "Bahkan ada yang tidak masuk sekolah," kata Kepala Sekolah MTsN 2 Sumbawa, Winadi Al Bayani,, Rabu (17/9/2025).

Kasus serupa juga terjadi di Garut, Jawa Barat, menimpa 194 siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Dari jumlah itu, 177 siswa mengalami gejala ringan, sementara 19 lainnya harus dirawat intensif di Puskesmas Kadungora.

Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ipda Adi Susilo, menjelaskan keracunan bermula usai siswa mengonsumsi menu MBG yang dikelola dapur SPPG Yayasan Al Bayyinah 2 Garut.

Menu yang disajikan berupa nasi putih, ayam woku, tempe orek, lalapan sayur, dan stroberi. "19 korban yang membutuhkan perawatan intensif terdiri atas 12 siswa MA Maarif Cilageni, 3 siswa SMP Siti Aisyah, 1 siswa SMA Siti Aisyah, dan 3 siswa SDN 2 Mandalasari," kata Adi, dikutip dari Kompas.id.

Hal serupa juga terjadi pada belasan siswa SMAN 2 Lamongan. Mereka dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan makanan dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (17/9/2025).

Humas RSI Nasruh Ummah, Irmayanti mengatakan, dari 13 siswa, empat di antaranya telah membaik dan diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan.

"Ini ada kasus keracunan

makanan dari MBG. Ini dari SMA Negeri 2 Lamongan. Yang ke IGD ini tercatat sekitar 13 pasien. Tapi untuk yang empat orang tadi sudah rawat jalan, pulang," kata Irma.

Ia memastikan bahwa belasan siswa yang mual dan muntah itu memang keracunan MBG. Karena itu pihaknya juga telah mengonfirmasi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat. "Ini juga sudah diindikasikan sama bapak-bapak yang dari pihak MBG," terangnya dilansir CNN Indonesia.

Terkait dengan hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Sultan Bachtiar Najamudin meminta BGN sebagai penyelenggara program MBG mengurangi jumlah penerima MBG pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, masifnya insiden keracunan MBG menunjukkan ada hal penting yang harus dievaluasi. Salah satunya adalah jumlah penerima yang terlalu banyak mencapai 3000 orang pada setiap SPPG, sehingga banyak mempengaruhi proses pengolahan bahan Pangan dan kualitas menu MBG.

"DPD RI secara kelembagaan mendukung penuh program MBG yang merupakan cara pemerintah meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Harus kita akui, secara ekonomi program yang penting ini memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi daerah," ujar Sultan dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

DPD RI secara kelembagaan menyampaikan apresiasi kepada BGN yang terus berupaya keras memperluas jangkauan penerima manfaat MBG hingga ke daerah terjauh dan terluar. DPD mendukung penuh program prioritas pemerintah yang bertujuan luhur ini.

"Sehingga mustahil rasanya jika program yang menasar puluhan juta penerima dalam sehari terhindar dari insiden-insiden normal seperti yang terjadi akhir-akhir ini," ungkap Sultan.

Meski demikian, Sultan menyampaikan beberapa insiden keracunan makanan yang muncul dalam realisasi program MBG perlu kita kaji dan evaluasi bersama. Ini merupakan bentuk kepedulian kita semua terhadap program pemerintah.

"Insiden keracunan makanan dapat menyebabkan anak-anak dan orang tua trauma untuk kembali mengonsumsi MBG. Kita tidak ingin program presiden yang baik ini disalahpahami dan justru menyebabkan persoalan sosial baru di daerah," tegasnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan BGN perlu berkolaborasi dengan BPOM untuk membekali setiap SPPG, dengan satu karyawan yang memiliki kemampuan dalam

pemeriksaan mutu pangan dan makanan.

Selain itu, Sultan juga mendorong peran serta semua pihak terkait di daerah, seperti Pemda, kepolisian dan masyarakat dalam mengawasi dan mendukung realisasi program MBG.

"Perlu diterapkan total quality management pada setiap SPPG dengan pendekatan best manufacturing practice. Karena pada prinsipnya, bahan dan proses pengolahan Pangan dapat berpengaruh ganda terhadap kesehatan jasmani, sebagai sumber energi dan gizi atau justru sebaliknya," tutupnya.

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menyampaikan bahwa pemerintah harus menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan dalam program MBG sehingga tidak meresahkan masyarakat.

"Program MBG ini niatnya baik, tapi jangan sampai salah kelola. Yang harus dijamin adalah kualitas gizi, keamanan pangan, dan tanggung jawab pemerintah. Anak-anak kita harus sehat, orang tua harus tenang," kata Edy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Hal tersebut dia sampaikan untuk merespons polemik surat pernyataan bermasalah dari Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Brebes, Jawa Tengah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Surat yang sempat beredar luas itu memicu keresahan karena berisi klausul yang dianggap merugikan orang tua, yakni larangan menuntun sekolah jika anak mengalami keracunan serta kewajiban mengganti wadah makan yang rusak dengan biaya Rp80 ribu. Menurut Edy, bagi masyarakat, isi surat tersebut terasa tidak adil dan justru menimbulkan kecemasan, padahal MBG sejatinya hadir untuk menyetatkan anak-anak.

"Keamanan anak adalah tanggung jawab nasional, bukan beban orang tua. Program Makan Bergizi Gratis harus memberi nutrisi, bukan kecemasan," kata dia.

Edy, dikutip antara, menilai langkah pencabutan surat itu sudah tepat, tetapi kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bahwa pelaksanaan MBG tidak boleh dilakukan serampangan. Dia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan setiap penyedia makanan memiliki standar keamanan pangan yang jelas, termasuk kewajiban sertifikasi resmi. Dengan demikian, menurutnya, mutu gizi dan higienitas makanan benar-benar terjamin.

Lebih lanjut, Edy menegaskan negara wajib hadir dalam menjamin keamanan program MBG. Jika sampai terjadi kasus keracunan, ia berpandangan bahwa seluruh biaya pengobatan harus ditanggung pemerintah, bukan orang tua maupun sekolah.

Edy juga mendorong keterlibatan Puskesmas, tenaga gizi, dan petugas kesehatan lingkungan dalam pengawasan distribusi makanan di sekolah-sekolah agar kualitas program ini bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan penyebab kasus keracunan yang sempat menimpa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengungkapkan, ada dua faktor utama yang menjadi penyebab insiden tersebut.

Dadan menjelaskan, salah satunya terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang baru beroperasi. Karena itu, dia menyarankan agar SPPG yang baru mulai beroperasi untuk memulai secara bertahap.

"Satu penyebabnya disebabkan oleh baru beroperasinya SPPG seperti yang di Bengkulu. Makanya kami kemudian sarankan untuk SPPG baru, itu mulainya bertahap karena ibu-ibu yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000 (porsi). Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu, nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah itu yang kami sarankan," kata Dadan saat ditemui usai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah di Kantor-nya, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Selain itu, Dadan mengungkapkan ada juga kasus keracunan di Maluku Barat Daya yang muncul karena pergantian pemasok bahan baku. "Yang kejadian di Maluku Barat Daya atau di Baubau itu sudah 8 bulan berjalan jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. Jadi bahan baku yang biasa dipasok oleh supplier yang rutin, karena ingin meningkatkan kearifan lokal diganti oleh supplier lokal yang mungkin belum siap," jelasnya.

Dadan mengakui kasus-kasus keracunan dalam program MBG masih terjadi. Karenanya, dia berupaya agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi. "Jadi hal-hal yang seperti itu masih terjadi. Jadi kami terus berupaya agar kejadian itu tidak terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang Badan Gizi sudah membuat 1 miliar porsi makan, 1 miliar porsi makan," ucap dia.

Meski demikian, Dadan menegaskan target pemerintah tetap tidak berubah, yakni program MBG harus bebas dari insiden keracunan. "Ya tetap lah, MBG itu harus zero incident. Kita kan ingin membuat anak cerdas, sehat, kuat, ya harus makanannya dikonsumsi dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan pencernaan," pungkasnya. (han,ant,ist/lut)

DUGAAN KORUPSI KUOTA HAJI KPK PANGGIL DIRJEN KEMENAG DAN MANTAN KEPALA KJRI JEDDAH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menuntaskan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Kali ini KPK memanggil Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief (HL) dan mantan Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi Nasrullah Jasam (NJ) sebagai saksi.



Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief saat berada di Gedung KPK, Kamis (18/9/2025).

Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama HL, Dirjen PHU Kemenag periode Oktober 2021 sampai sekarang," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Pihak KPK, dilansir dari antara, menyebutkan bahwa Nasrullah Jasam

tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 08.48 WIB, sedangkan Hilman Latief pada pukul 10.22 WIB.

Ini kedua kalinya Hilman dipanggil KPK. Hilman dipanggil KPK terkait kasus korupsi kuota haji 2024 pada Agustus lalu. Namun saat itu Hilman meminta pemeriksaan ulang karena harus melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan haji 2025 ke Komisi VIII DPR RI.

Kasus korupsi kuota haji tahun 2024 ini sudah naik ke tahap penyidikan. Akan tetapi KPK belum menetapkan tersangka. KPK telah memeriksa sejumlah pihak, dan KPK juga telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.

Sebelumnya, Budi juga mengatakan bahwa KPK akan segera mengumumkan tersangka dalam kasus tersebut. Namun, tidak menyebutkan secara pasti kapan waktu pengumuman akan dilakukan.

"Yang pertama, sedang kami siapkan. Jadi kita sama-sama tunggu secepatnya, nanti kami akan hubungkan dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/9/2025) kemarin.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa sampai saat ini KPK masih terus mendalami kasus yang menyeret nama mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Sejumlah pihak dari Kementerian Agama, biro perjalanan haji, hingga organisasi keagamaan juga turut dipanggil untuk diminta keterangan. Hingga pelanggaan terhadap Hilman Latief dan Nasrullah Jasam.

Budi meyakini, saksi yang dipanggil mengetahui detail dugaan

korupsi penyelenggaraan haji 2023-2024. Ia juga memastikan bahwa tidak ada hambatan berarti dalam proses penyidikan.

"Sejauh ini penyidikan berjalan baik, tidak ada kendala dan progresif. Hal ini dibuktikan bahwa penyidik secara progresif tidak hanya melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada banyak pihak yang diduga mengetahui, tidak hanya dari pihak-pihak di Kementerian Agama, di lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan ibadah haji, tapi juga asosiasi dan para biro perjalanan," jelasnya.

KPK juga masih mendalami uang yang dikembalikan Khalid Zeed Abdullah Basalamah (Khalid Basalamah) untuk mengetahui aliran dana atas pembagian tambahan kuota haji di Kementerian Agama. "Karena pada praktiknya diduga jual-beli kuota ini tidak hanya dilakukan oleh biro perjalanan haji kepada para calon jemaah, tapi juga dilakukan antar biro perjalanan haji," kata Budi.

Sebelumnya, lembaga antirasuah mengatakan telah menerima uang dari Khalid Basalamah, pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhad Tour itu menyerahkan uang tersebut kepada KPK yang merupakan dana pengembalian dari PT Muhibbah Mulia Wisata Ibnu Mas'ud. "Benar," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto Senin (15/9/2025).

Setyo mengatakan belum memverifikasi jumlah pasti dari dana yang diterima KPK itu. Karena itu, KPK belum bisa menyampaikan kepada publik berapa dana tersebut.

Dikutip dari Antara, Khalid Basalamah yang merupakan Ketua Majelis Utama Travel Indonesia Arahkan Haji dan Umrah (Mutiara Haji), mengungkap pengalamannya sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama periode 2023-2024. Kesaksian itu ia sampaikan saat hadir di kanal YouTube Kasisolusi pada 13 September 2025.

Khalid menuturkan, ia bersama

122 jemaah Uhad Tour sudah lebih dulu melunasi biaya visa haji furoda beserta akomodasi dan transportasi di Arab Saudi. Namun, belakangan Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas'ud, menghubungi Sekretaris Jenderal Mutiara Haji, Luthfi Abdul Jabbar, untuk mengatur pertemuan.

Dalam pertemuan itu, Ibnu Mas'ud menawarkan visa haji khusus dari jatah tambahan 20 ribu kuota yang diklaim resmi dari Pemerintah Arab Saudi. Kendati demikian, Khalid menegaskan dirinya tak berminat dengan tawaran tersebut.

Dalam pertemuan itu, Ibnu Mas'ud menawarkan visa haji khusus dari jatah tambahan 20 ribu kuota resmi Pemerintah Arab Saudi yang disebut bisa langsung berangkat. Khalid mengaku semula tak tertarik dengan tawaran tersebut.

Namun, saat dijanjikan fasilitas maktab VIP yang lokasinya dekat dengan jamarat, Khalid menyebut penawaran itu cukup menarik. Khalid kemudian menjelaskan per jemaah haji harus membayar 4.500 dolar Amerika Serikat untuk mendapatkan visa dengan keuntungan tersebut.

Walaupun demikian, sebanyak 37 dari 122 jemaah belum diurus visanya oleh Ibnu Mas'ud, dan diminta membayar tambahan sebesar 1.000 dolar AS per jemaah. Setelah itu, dia mengaku baru menyadari uang tersebut dianggap sebagai biaya jasa untuk Ibnu Mas'ud.

Khalid mengaku bertanya seperti itu karena dirinya merupakan ustaz, sehingga harus paham halal dan haram. Namun, Ibnu Mas'ud mengancam tidak mau melanjutkan proses visa jemaahnya untuk berangkat haji.

Usai pelaksanaan ibadah haji, Khalid menuturkan bahwa Ibnu Mas'ud mengembalikan biaya sebesar 4.500 dolar AS per jemaah. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta uang itu, dan Khalid mengaku telah menyerahkannya kembali.(ant,ist/lut)



Sejauh ini penyidikan berjalan baik, tidak ada kendala dan progresif. Hal ini dibuktikan bahwa penyidik secara progresif tidak hanya melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada banyak pihak yang diduga mengetahui, tidak hanya dari pihak-pihak di Kementerian Agama, di lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan ibadah haji, tapi juga asosiasi dan para biro perjalanan,"

Budi Prasetyo
Juru Bicara KPK